



LAPORAN KINERJA TRIWULAN III 2022

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR

Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami ucapkan kehadiran Alloh SWT karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi dalam membantu pencapaian visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022 ini memaparkan target dan realisasi kinerja yang mengacu pada Penetapan Kinerja Tahun 2022. Kami menyadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang obyektif tentang capaian kinerja Loka Riset sumber Daya dan Kerentanan Pesisir serta dapat menjadi acuan dalam merencanakan kinerja pada Tahun-tahun berikutnya.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022 ini kami ucapkan terima kasih. Saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan Laporan Kinerja ini.

Padang, 17 Oktober 2022

Kepala Loka



Nia Naelul Hasanah Ridwan, S.S
NIP. 19750401 200502 2 001



DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
Ikhtisar Eksekutif	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan,	3
C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
D. Keragaan SDM LRSDKP	6
E. Sistematika Laporan Kinerja.....	7
II. PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis.....	9
B. Rencana Kerja Tahun (RKT) 2022	15
C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022.....	16
D. Pengukuran Kinerja	19
III. AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Evaluasi dan analisis Kinerja	23
C. Akuntabilitas keuangan Triwulan III Tahun 2022	33
d. Efisiensi Anggaran dan Alokasi Sumber Daya	36
IV. PENUTUP	39
A. Kesimpulan.....	40
B. Rekomendasi.....	41



DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Rencana Kerja Tahunan LRSDKP tahun 2022 awal.....	15
Tabel 2.	Rencana Kerja Tahunan LRSDKP tahun 2022 Revisi	16
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2022 awal	17
Tabel 4.	Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2022 Revisi	18
Tabel 5.	Capaian kinerja LRSDKP Triwulan III Tahun 2022.....	23
Tabel 6.	Capaian IKU 2 LRSDKP Triwulan III Tahun 2022	26
Tabel 7.	Rincian Capaian IKU 2 LRSDKP Triwulan III Tahun 2022	27
Tabel 8.	Capaian IKU 4 LRSDKP Triwulan III Tahun 2022	28
Tabel 9.	Capaian IKU 6 LRSDKP Triwulan III tahun 2022.....	29
Tabel 10.	Capaian IKU 7 LRSDKP Triwulan III tahun 2022.....	32
Tabel 11.	Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan III tahun 2022.....	33
Tabel 12.	Realisasi anggaran Per Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2022	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir 48/PERMEN-KP/2020	5
Gambar 2.	Struktur Organisasi Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir 82/PERMEN-KP/2020	6
Gambar 3.	Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP 2022	7
Gambar 4.	Dashboard Kinerja LRSDKP	22
Gambar 5.	Nilai Smart LRSDKP Triwulan III Tahun 2022	37
Gambar 6.	Dashboard Kinerja LRSDKP	40

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa yang akan datang.

Dalam laporan ini dipaparkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja output kegiatan tahun 2022. Setiap kegiatan memiliki tiga jenis indikator yaitu indikator *input*, *output* dan *outcome*. Namun pengukuran kinerja kegiatan Triwulan III Tahun 2022 masih difokuskan pada indikator *input* dan *output* saja sedangkan pengukuran indikator *outcome* sebagai wujud berfungsinya *output* masih akan dikaji lebih lanjut.

Pada tahun 2022 Triwulan I Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir menetapkan 3 Sasaran Strategis yang diuraikan menjadi 11 Indikator Kinerja Utama, dan untuk triwulan II terdapat perubahan menjadi 2 Sasaran strategis yang dijabarkan dalam 10 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja LRSDKP tahun 2022 masih menggunakan metode/tools pengukuran *eksternal*.

Hasil pengukuran capaian kinerja *Eksternal* LRSDKP yang menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), NPSS LRSDKP Triwulan III Tahun 2022 menggunakan metode pengukuran *eksternal* adalah sebesar 112,09%.

Hasil pengukuran dan analisis tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan akhir Triwulan III Tahun 2022 Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir mempunyai capaian kinerja dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 112,09% dengan status baik (warna hijau) pada pengukuran menggunakan metode *Eksternal*.

Rincian target dan realisasi dari 3 (Tiga) indikator kinerja utama LRSDKP pada Triwulan III Tahun 2022, sebagai berikut:

- a) Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) , target 100%, realisasi 100%;
- b) Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen) 86%, realisasi 100% (116,28%);
- c) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen) dengan target 70%, realisasi 100% (142,8%).

Nilai efisiensi anggaran LRSDKP pada Triwulan III adalah sebesar 61,38. Nilai efisiensi didapatkan dari efisiensi yang memiliki rentang nilai dari +20 sampai -20, Efisiensi yang mencapai skor 4,55 menyebabkan perolehan nilai efisiensi sebesar 61,38. Keberhasilan perolehan nilai efisiensi sebesar 61,38 dan capaian nilai Smart 63,20 dipengaruhi oleh beberapa hal salah satunya adalah Realisasi anggaran pada posisi 54,43% dengan tingkat output kegiatan mencapai 100% dan bahkan melampaui.

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

IKU dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.



Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2022 ini diharapkan dapat menjadi pertanggung jawaban secara tertulis sekaligus dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan kegiatan yang akan datang sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*).



BAB I

PENDAHULUAN

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah mengamanatkan setiap entitas pelaporan wajib menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Sebagai entitas pelaporan, LRSDKP wajib menyusun laporan keuangan dan laporan kinerja. Selanjutnya, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, memberikan definisi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Lebih lanjut, akuntabilitas kinerja didefinisikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/traget kinerja yang telah ditetapkan melalui kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, sejumlah peraturan perundang-undangan menjadi guidance bagi praktik-praktik penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan good governance dan clean government, antara lain:

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; dan
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan amanat yang tertuang pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2019-2024, Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan pokok ketiga yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta mengembangkan Inovasi IPTEK kelautan dan perikanan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka pemenuhan kewajiban atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan tujuan:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas capaian Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir pada Triwulan III Tahun 2022, kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; dan.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir untuk meningkatkan kinerjanya di triwulan berikutnya dan juga tahun berikutnya.

C. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir, Loka Riset Sumber

Daya Dan Kerentanan Pesisir merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP). Selain itu juga pada tahun 2019 sesuai dengan Pasal 19 Bab VI Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia NOMOR 20/PERMEN-KP/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir maka satuan kerja Instalasi Pengembangan Sumberdaya Air Laut Pamekasan yang sebelumnya berada dibawah PUSRISKEL terhitung mulai diterbitkannya Permen KP ini beralih berada dibawah LRSDKP Padang untuk pengalokasian anggaran dan status BMN dan kepegawaian IPSDAL tersebut akan berada penuh dibawah LRSDKP.

Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir mempunyai tugas Melaksanakan penelitian di bidang penelitian sumber daya fisik dan kerentanan pesisir, dan menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan dan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian dan melaksanakan publikasi hasil penelitian.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, dan kerja sama penelitian sumber daya dan kerentanan pesisir;
- c. pengelolaan prasarana dan sarana penelitian; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk memenuhi tugas dan fungsi seperti tersebut di atas, LRSDKP melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan layanan ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain pengelolaan dan peran serta dalam jejaring riset sumberdaya, pengelolaan jaringan informasi dan penyebaran hasil-hasil penelitian melalui pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan, pameran, seminar, pelatihan magang, jasa konsultasi, media cetak, elektronik maupun internet;

2. Menyelenggarakan layanan perkantoran yang meliputi antara lain pemenuhan daya dan jasa, pemeliharaan gedung kantor dan sarana dan prasarana penelitian, penyediaan pakaian kerja, pemenuhan makanan peningkat daya tahan tubuh;
3. Melaksanakan dukungan manajemen terhadap kegiatan penelitian yang meliputi penyusunan dan pengelolaan anggaran, pelayanan teknis, ketata-usahaan dan monitoring dan evaluasi;
4. Melaksanakan pembinaan sumberdaya manusia menuju penciptaan sistem dan budaya kerja yang berasaskan kejujuran, kreativitas, produktivitas dan profesionalisme; dan
5. Meningkatkan pendayagunaan sumberdaya penelitian melalui penggalangan kerjasama penelitian dan operasional dalam rangka penciptaan suasana kerja yang kondusif dan peningkatan kesejahteraan pegawai.

Adapun struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 48/PERMEN-KP/2020 tanggal 25 September 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi LRSDKP
sesuai permen KP Nomor: 48/PERMEN-KP/2020

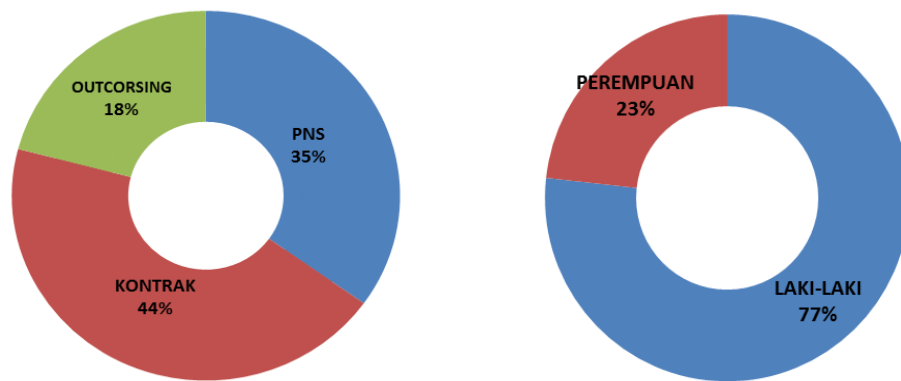
Kemudian terdapat perubahan lagi pada struktur organisasi LRSDKP sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 82/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkup KKP, sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi LRSDKP
sesuai permen KP Nomor: 82/PERMEN-KP/2020

D. KERAGAAN SDM LRSDKP

Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) memiliki 1 Instalasi dan memiliki pegawai yang berjumlah 42 orang, yang terdiri dari 14 PNS (34,8%) dan 19 Tenaga Kontrak (44,1%) dan 9 Tenaga Outcorcing (20%). Pegawai PNS 13 orang di kantor LRSDKP dan 1 orang di kantor IPSAL, untuk pegawai kontrak 9 orang di kantor LRSDKP dan 10 Orang di kantor IPSAL, untuk Tenaga Outcoring 7 orang berada di kantor LRSDKP dan 2 orang di kantor IPSAL. Berikut keragaannya jumlah Pegawai LRSDKP pada Triwulan III tahun 2022.



Gambar 3. Keragaan jumlah pegawai lingkup LRSDKP pada tahun 2022

E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja, sistematika penyajian laporan sebagai berikut :

1. **Ringkasan Eksekutif**, bab ini berisi ringkasan dari laporan ini, antara lain berisi uraian singkat tentang tujuan, sasaran, capaian kinerja dan kendala selama Triwulan III tahun 2022
2. **Bab I Pendahuluan**, berisi latar belakang, tugas dan fungsi, struktur organisasi, serta keragaan pegawai di LRSDKP
3. **Bab II Perencanaan Kinerja**, berisi tentang Rencana Strategis LRSDKP 2019-2024, dan Penetapan kinerja LRSDKP Triwulan III tahun 2022 dan pengukuran Kinerja.
4. **Bab III Akuntabilitas Kinerja**, berisi capaian kinerja dari Indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan, serta dilakukan analisis capaian kinerja;
5. **Bab IV Penutup**, berisi uraian terkait kesimpulan, permasalahan dan rekomendasi Triwulan III tahun 2022; dan
6. **Lampiran-lampiran :**
 - a. Perjanjian Kinerja awal tahun 2022
 - b. Perjanjian Kinerja Revisi tahun 2022



BAB II

PERENCANAAN

KINERJA

LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 merupakan tahapan keempat sekaligus periode terakhir dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025. RPJPN menjadi sarana memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia (SDM) berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang terus meningkat.

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan (KP) jangka panjang pada periode pembangunan tahap ke-4 (2020-2024) adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Hal ini ditegaskan dalam misi ketujuh pembangunan nasional yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju dengan basis kepentingan Nasional. Misi tersebut selaras dengan salah satu sasaran pokok RPJPN 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) tahun 2020 - 2024, mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Visi kementerian kelautan dan perikanan pada tahun 2020 - 2024 adalah mendukung visi presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong. Visi KKP menjadi penting dengan keberadaan BRSDM KP sebagai lembaga pendukung untuk mencapai tujuan RPJMN tahap IV.

Peran strategis keberadaan BRSDM KP yaitu mendukung visi dan misi KKP melalui kegiatan riset dan pengembangan SDM. Peran strategis BRSDM KP meliputi: 1) merumuskan perencanaan pembangunan KP nasional melalui penyediaan hasil riset inovatif dan SDM kompeten; 2) menyelenggarakan riset dan pengembangan SDM yang mengikuti perkembangan era globalisasi dan ekonomi digital; 3) menghasilkan riset inovatif dan implementatif yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, serta mencetak SDM unggul yang mampu bersaing sesuai dengan kebutuhan dunia usaha/industri; 4) melaksanakan pengelolaan alih teknologi bidang KP secara efektif, efisien, dan tepat sasaran; 5) melakukan sharing Knowledge Base Management System (BMS) dalam mengaplikasikan hasil riset KP; 6) meningkatkan pendidikan SDM dan perluasan akses pendidikan vokasi bagi anak pelaku usaha KP; 7) meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan/atau sertifikasi secara optimal; 8) mewujudkan pelaku utama yang mandiri, kompeten, sadar/peduli terhadap inovasi teknologi, kelestarian, dan keberlanjutan sumber daya KP; 9) mewujudkan tata kelola riset dan SDM yang baik dan melakukan kerja sama dengan lembaga/instansi dalam dan luar negeri; 10) Meningkatkan kontribusi PNB (royalti dan Hak Kekayaan Intelektual/HAKI) melalui hasil riset serta pengembangan SDM.

Tugas dan fungsi BRSDM KP sebagai penyelenggara riset inovatif di bidang KP dan pengembangan SDM kompeten, memberikan dampak pada peningkatan ekonomi. Hasil riset yang inovatif dan SDM yang kompeten menjadi faktor utama keberhasilan pengelolaan sumber daya KP secara berkelanjutan. Dinamika lingkungan strategis pembangunan KP harus disikapi BRSDM KP dengan mengoptimalkan kekuatan internal, serta mengubah tantangan yang dihadapi menjadi peluang.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMENKP/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (LRSDKP) berkontribusi terhadap pengawalan kebijakan mewujudkan masyarakat sektor KP yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir yang mulai berlaku tanggal 27 Maret 2017. Sejalan dengan hal tersebut, telah ditetapkan Rencana Strategis LRSDKP 2020 - 2024.

Adapun Rencana Strategis (Renstra) Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir ini telah ditetapkan minimal untuk memenuhi capaian indikator RPJMN Kegiatan Eselon III atasan (Pusat Riset Kelautan) tahun 2020- 2024 yang berisi langkah-langkah strategis jangka menengah yang akan memberi arah bagi penyelenggaraan kegiatan penelitian Sumberdaya Pesisir maupun Kerentanan Pesisir dalam rangka menunjang visi pembangunan kelautan dan perikanan.

I. Visi

Visi ditetapkan untuk menyatakan gambaran keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan sebagai arahan agar segenap jajaran LRSDKP dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisispatif, inovatif dan produktif. Sebagai UPT yang berada di bawah Pusat Riset Kelautan, maka visi LRSDKP merupakan turunan dari visi Badan Riset Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM-KP) dan visi Pusat Riset Kelautan (PUSRISKEL). maka visi yang ditetapkan LRSDKP adalah mendukung Visi KKP yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan” untuk

mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong.”.

2. Misi

Dalam rangka untuk mewujudkan visi tersebut, misi dari LRSDKP disusun sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir yang Handal
- b. Meningkatkan Kapasitas Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan Kerentanan Pesisir
- c. Mendiseminasikan Hasil Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Laut dan kerentanan Pesisir.

3. Tujuan

Tujuan (renstra) LRSDKP dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

- a) Melaksanakan penelitian dalam bidang karakteristik dan potensi sumberdaya dan kerentanan pesisir berdasarkan lingkungan fisik
- b) Menyediakan data serta informasi kepada pemangku kepentingan
- c) Berkoordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan UPT melalui kerjasama penelitian
- d) Melaksanakan publikasi hasil penelitian.

4. Sasaran Strategis

Renstra LRSDKP Tahun 2020-2024 menjelaskan bahwa sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui pelaksanaan program riset Sumber daya dan Kerentanan Pesisir merupakan kondisi yang akan dicapai sebagai suatu outcome/impact dari program yang dilaksanakan, dengan menggunakan pendekatan metoda Balanced Scorecard (BSC).

LRSDKP telah menetapkan target kinerja yang akan dicapai dalam bentuk kontrak kinerja antara Kepala LRSDKP dengan Kepala Pusriskel, Pada Kontrak kinerja tersebut terdapat peta strategi (strategy map) dengan 3 (Tiga) sasaran Kegiatan (SK) yang harus dicapai, ada perubahan peta strategis dari 3 Sasaran Kegiatan pada Triwulan I berubah menjadi 2 Sasaran Kegiatan pada Triwulan II dan III. Untuk setiap SK yang disusun dan ditetapkan memiliki satuan ukur pencapaian yang disebut sebagai Indikator Sasaran Kegiatan (IKSK).

Sasaran Kegiatan Kedua (SK-1) yang akan dicapai dilevel 3 adalah Tersedianya Data, informasi dan rekomendasi Kebijakan hasil Riset Kelautan, dengan indikator Sasaran Kegiatan:

- Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket) dari 5 paket tahun 2022. Mulai tahun 2022 mengalami perubahan Tusi Kelembagaan sehingga Tidak melakukan riset lagi.

Sasaran Kegiatan Ketiga (SK-2) yang akan dicapai dilevel 3 adalah Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir, dengan indikator kinerja:

- Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) dari 100% pada tahun 2022 menjadi 100% pada tahun 2024
- Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen) adalah ≤ 1 setiap tahunnya dari 2022 sampai 2024
- Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks) dari 76 tahun 2022 menjadi 76 tahun 2024
- Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP dari 92% pada tahun 2022 menjadi 92% pada tahun 2024
- Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen) pada tahun 2022 sebesar 86%
- Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen) sebesar 70% tahun 2022.

- Nilai IKPA Satker LRSDKP dari 89 tahun 2022 menjadi 89 tahun 2024
- Nilai kinerja anggaran (NKA) Satker LRSDKP dari nilai 81 tahun 2022 menjadi sangat baik tahun 2024
- Unit Kerja LRSDKP yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja), dari 1 unit kerja pada tahun 2022 menjadi 1 pada tahun 2024

5. Potensi dan Permasalahan

a. Potensi

Adanya SDM dan IPTEK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan dan berkelanjutan terutama pada sektor sumber daya dan kerentanan Pesisir. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan riset sumberdaya dan kerentanan pesisir.

Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir didukung oleh 7 orang peneliti dari beberapa bidang keilmuan yakni peneliti oceanografi, peneliti geologi, Peneliti Arkeologi, Peneliti Kelautan, dan 1 orang teknisi litkayasa. Selain SDM, LRSDKP juga didukung oleh Peralatan fungsional riset yakni *Geolistrik/IP Meter, ADCP, Tide Gauge, Turbidity Meter, Water Multiparameter Checker, Data Logger, Peralatan Selam, Portable Automatic Weather System, Singlebeam Echosounder*. Adanya bengkel/workshop mekanikal, laboratorium pengembangan produk garam yang cukup lengkap di IPSAL Madura dan Laboratorium Kualitas Air dan Sedimen di kantor LRSDKP.

b. Permasalahan

Masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program riset, pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan untuk mendukung pembangunan KP antara lain:

- 1) Belum optimalnya kolaborasi dan sinergi kegiatan riset dan pengembangan SDM untuk memperkuat capaian output dan sasaran kinerja kementerian serta merespon isu SDM dan riset nasional, regional, dan Internasional;
- 2) Belum terbangun sebuah sinergi hulu dan hilir pemanfaatan hasil Riset dan SDM oleh Unit Teknis KKP dalam merealisasikan program prioritas KKP khususnya program prioritas yang ditetapkan sebagai quick win pembangunan sektor KP;
- 3) Kurang optimalnya kerjasama dalam dan luar negeri jejaring kerjasama (instansi pemerintah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat/LSM dalam dan luar negeri, serta dunia usaha dan industri (DUDI)) untuk meningkatkan kapasitas riset dan SDM KP yang dapat membuka peluang terhadap pemanfaatan bersama aset/sumber daya (resource sharing).

B. RENCANA KERJA TAHUN (RKT) 2022

Dalam upaya mendukung pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis, Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi awalnya memiliki pagu anggaran sebesar Rp8.412.147.000,-, bersumber dari APBN dan terbagi dalam 5 output yakni:

- Output Cadangan/pengadaan Barang Jasa Rp1.500.000.000,-
- Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan Rp1.500.000.000,-
- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp5,412,147,000,-

Tabel 1. Rencana Kerja Tahunan LRSDKP tahun 2022 awal

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
IKSK.1.1	Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada satker LRSDKP (unit)	Rp1.500.000.000,-
IKSK.1.2	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket)	Rp1.500.000.000,-
IKSK.1.3	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen)	Rp5,412,147,000,-

Kemudian mengalami pemotongan sehingga pagu anggaran menjadi Rp6.912.647.000 yang terbagi dalam 4 output antara lain :

- Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan Rp1.500.000.000,-
- Layanan Dukungan Manajemen Internal Rp5,412,147,000,-

Tabel 2. Rencana Kerja Tahunan LRSDKP tahun 2022 Revisi

NO	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
IKSK.1.1	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket)	Rp1.500.000.000,-
IKSK.1.2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen)	Rp5,412,147,000,-

C. PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2022

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan indikator kinerja dan target kinerja yang dituangkan ke dalam perjanjian kinerja (PK). Perjanjian kinerja merupakan instrumen pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, merupakan tekad dan janji yang akan dicapai antara pimpinan unit kerja yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja.

Pada Tahun 2022, terdapat 3 (tiga) Sasaran Kegiatan LRSDKP yaitu: (1) Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan; (2) Tersedianya Data, informasi dan rekomendasi Kebijakan hasil Riset Kelautan; (3) Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir, dengan 10 (sepuluh) IKU. Perjanjian Kinerja LRSDKP Tahun 2022 awal yaitu:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2022 awal

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	1	Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada satker LRSDKP (unit) ^a	1
2	Tersedianya Data, informasi dan rekomendasi Kebijakan hasil Riset Kelautan	2	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket) ^b	5
3	Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	3	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen)	100
		4	Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)	≤1
		5	Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)	76
		6	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92
		7	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	86
		8	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	70
		9	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89
		10	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81

PK LRSDKP tahun 2022 mengalami revisi terakhir per-Mei 2022, yaitu berkurangnya Sasaran Kegiatan dari 3 SS menjadi 2 SS dan juga dari 11 IKU menjadi 10 IKU, untuk sasaran kegiatan yang dihapus adalah SS 1 “Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan” dan IKU 1 juga “Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada satker LRSDKP (unit)”

Selanjutnya, Sasaran Strategis LRSDKP tahun 2022 yang telah ditetapkan, dijabarkan ke dalam indikator kinerja dengan target kinerja, 2 (Dua) Sasaran Kegiatan LRSDKP yang diwujudkan oleh 10 (sepuluh) Indikator Sasaran Kegiatan, Rincian dan target Perjanjian Kinerja LRSDP pada tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja LRSDKP tahun 2022 Revisi

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TARGET
1	Tersedianya Data, informasi dan rekomendasi Kebijakan hasil Riset Kelautan	1	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket) ^a	5
2	Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) ^b	100
		3	Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)	≤1
		4	Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)	76
		5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92
		6	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	86
		7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	70
		8	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89
		9	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81
		10	Unit Kerja Lingkup Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja)	1

D. PENGUKURAN KINERJA

1. Teknik Pengukuran

Pengukuran Capaian kinerja LRSDKP Tahun 2022, dilakukan dengan membandingkan antara data target dan realisasi IKU, yang nantinya akan menghasilkan indeks capaian IKU. Penghitungan indeks capaian IKU dengan memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
4. Adapun status Indeks capaian IKU adalah sebagai berikut:

	Baik	Skor ≥ 100
	Cukup	Skor $70 \leq \text{Skor} < 100$
	Kurang	Skor < 70
	Belum ada pencapaian	Skor 0
	Belum input capaian	

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen Balanced Scores Card (BSC).

2. Metode Pengukuran Kinerja

Metode pengukuran kinerja LRSDKP dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12). Selaku pihak yang bertanggungjawab dalam pengukuran, telah ditugaskan kepada Tim SAKIP dan Laporan Kinerja LRSDKP yang ditetapkan melalui ditetapkan Surat Keputusan Kepala Loka Riset tentang

Pembentukan Tim Pelaksana Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LRSDKP.

Keanggotaan Tim SAKIP dan Laporan Kinerja terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua Bidang yang ada di LRSDKP. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja triwulanan dipantau oleh Tim SAKIP dan Laporan Kinerja yang menjadi penanggung jawab kegiatan, selanjutnya penanggung jawab kegiatan melaporkannya kepada Koordinator Tata Operasional. Berdasarkan laporan unit kerja penanggung jawab kegiatan, Bagian Program merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.



BAB III

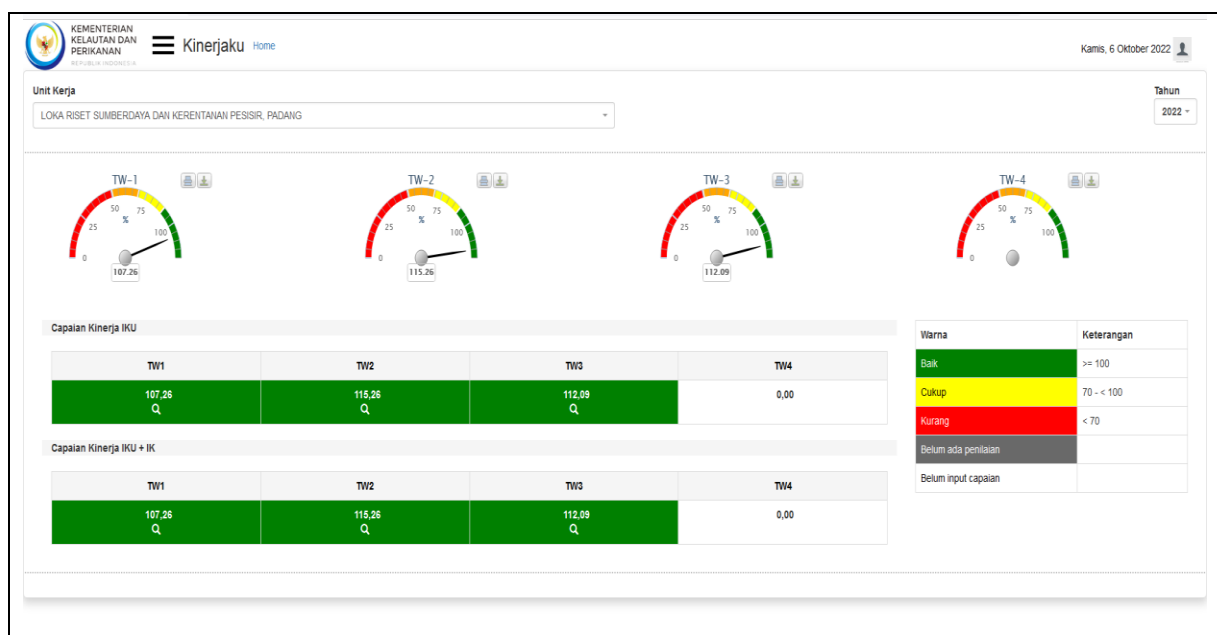
AKUNTABILITAS

KINERJA

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP triwulan III tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja (key performance indicator disingkat KPI) pada masing-masing IKU. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP tahun 2022 sebesar 112,09, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 4. Dashboard Kinerjaku LRSDKP

Hasil pengukuran pada aplikasi kinerjaku Triwulan III tahun 2022 ini, menunjukkan bahwa terdapat 3 IKU yang telah tercapai sesuai target triwulanannya yakni IKU 2 target

triwulan III 100% dan terealisasi 100%, IKU 6 target triwulan III adalah 86 dan terealisasi 100, IKU 7 target triwulan III adalah 70 dan tercapai 100%.

Capaian kinerja LRSDKP Triwulan III tahun 2022 merupakan kontribusi dari 3 Subkoordinator LRSDKP, yang pencapaian sasaran dan indikator kinerjanya menjadi tanggungjawab masing-masing subkoordinator.

B. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi LRSDKP. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi LRSDKP yang menjadi kontrak kinerja pada Tahun 2022 dapat tercapai.

LRSDKP pada tahun 2022 menjalankan 2 (Dua) Sasaran Kegiatan dengan 10 IKU, dengan capaian pada triwulan III secara rinci pada Tabel berikut:

Tabel 5. Capaian kinerja LRSDKP Triwulan III tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		Target 2022	TRIWULAN I			TRIWULAN II			TRIWULAN III		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%
Tersedianya Data, informasi dan rekomendasi Kebijakan hasil Riset Kelautan	1	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket) ^a	5	0	n/a	n/a	0	n/a	n/a	0	n/a	n/a



Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) ^b	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3	Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)	≤1	0	n/a	n/a	0	n/a	n/a	0	n/a	n/a
	4	Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)	76	0	n/a	n/a	50	78,5	157	0	n/a	n/a
	5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92	0	n/a	n/a	0	n/a	n/a	0	n/a	n/a
	6	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	86	86	100	116,28	86	100	116,28	86	100	116,28
	7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	70	70	100	142,8	70	100	142,8	70	100	142,8
	8	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89	0	n/a	n/a	70	89,98	101	0	n/a	n/a
	9	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81	0	n/a	n/a	0	n/a	n/a	0	n/a	n/a
	10	Unit Kerja Lingkup Pusat Riset Kelautan yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja)	1	0	n/a	n/a	0	n/a	n/a	0	n/a	n/a

SASARAN KEGIATAN 1

Tersedianya Data, informasi dan rekomendasi Kebijakan hasil Riset Kelautan

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 1

Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket) ^a

Untuk Indikator Kinerja ini anggarannya mengalami pemblokiran terkait dengan perubahan Tusi Riset dari KKP ke BRIN, anggaran riset akan diserahkan Kepada BRIN sebagai lembaga yang punya tusi untuk melakukan Penelitian.

SASARAN KEGIATAN 2

Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 2

Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) ^b

IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal satker LRSDKP bertujuan untuk melihat dukungan manajemen internal LRSDKP dalam hal Layanan Perkantoran dan layanan umum Riset Kelautan, Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal dan Monitoring dan Evaluasi Riset Kelautan, Layanan Kerjasama Riset Kelautan.

FORMULASI

- A. Jumlah target dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang direncanakan berdasarkan kegiatan dukungan manajemen yang dilaksanakan pada tahun berjalan.
- B. Jumlah realisasi dokumen hasil layanan dukungan manajemen internal (buah) adalah jumlah dokumen hasil layanan yang telah disusun dan diketahui pimpinan (di ttd) sebagai hasil pelaksanaan kegiatan dukungan manajemen pada tahun berjalan.

C. Dokumen hasil layanan dapat berupa laporan, matrik, screen shoot aplikasi yang bukan merupakan bukti capaian IKU lain.

D. Formula : *Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal* =

$$\frac{\text{Jumlah realisasi dokumen hasil layanan}}{\text{jumlah target dokumen hasil layanan}} \times 100\%$$

Terdapat 3 buah layanan yang menjadi target tahun 2022 ini yakni: Layanan dibawah tanggung jawab Tata Usaha, Layanan dibawah tanggungjawab Tata Operasional, Layanan dibawah tanggungjawab Pelayanan Teknis. Sampai dengan akhir Triwulan III tahun anggaran 2022 dari ketiga layanan tersebut telah terealisasi sehingga capaian untuk IKU ini adalah 100%.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Layanan Dukungan Manajemen Internal satker bertujuan untuk melihat dukungan manajemen internal LRSDKP dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Capaian IKU 2 LRSDKP Triwulan III Tahun 2022

IKU	TARGET 2022	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP, telah tercapai sesuai target yang telah ditetapkan, dengan capaian sebesar 100% atau tercapai 100 dari target 100 persen, IKU ini telah terealisasi sampai dengan triwulan III sebanyak 9 dokumen layanan dari target 9 dokumen layanan yakni TO, TU dan PT masing-masing 3 dokumen layanan atau 1 dokumen layanan per semester.

Tabel 7. Rincian Capaian IKU 2 LRSDKP Triwulan III Tahun 2022

	Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (akumulasi dari TW I, TW II dan TW III)			
	TU	TO	PT	TOTAL
Target	3	3	3	9
Realisasi	3	3	3	9

Secara umum, terdapat beberapa faktor pendukung keberhasilan IKU Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP, diantaranya:

1. Adanya komitmen dari penanggungjawab masing-masing layanan untuk memaksimalkan pelayanannya sesuai dengan tufoksi yang ada pada masing-masing layanan.
2. Adanya monitoring dan pendampingan dari kepala loka kepada masing-masing layanan ini.

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 3

Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)

Untuk Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya baru akan diukur pada triwulan IV

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 4

Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)

Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Pengukuran Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Terdapat empat dimensi indeks profesionalitas yang terdiri dari kompetensi, kualifikasi, disiplin dan kinerja dengan bobot penilaian secara berurutan: kompetensi (40), kinerja (30), kualifikasi pendidikan (25) dan disiplin (5).

Indeks Profesionalitas ASN LRSDKP diukur setiap semester. Pada tahun 2022, LRSDKP menetapkan target tahunan sebesar 76 dengan target pada semester I tahun 2022 sebesar 50. Capaian IKU ini pada triwulan II atau semester I 2022 mencapai 78,5 atau 157% dari target yang ditetapkan sebesar 50. Dibandingkan dengan target tahunan, diperlukan upaya untuk terus meningkatkan capaian hingga mencapai target tahunan 76.

Tabel 8. Capaian IKU 4 LRSDKP Triwulan III Tahun 2022

IKU	TARGET 2022	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%
Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks	76	0	0	-	50	78,5	157	0	0	-

Untuk Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya diukur pada triwulan II dan Triwulan IV. Hasil pengukuran pada triwulan II diperoleh nilai 89,98.

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 5

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)

Untuk Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya baru akan diukur pada triwulan berikutnya karena Rekonsiliasi kinerja baru akan dilaksanakan pada triwulan IV

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 6

Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)

Manajemen pengetahuan merupakan proses untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Dari pengertian tersebut manajemen pengetahuan erat kaitannya dengan kolaborasi. Dengan demikian pengetahuan akan bermanfaat ketika dibagikan kepada pihak-pihak terkait, baik di dalam maupun di luar organisasi.

Sejak tahun 2016 penerapan manajemen pengetahuan dijadikan sebagai salah satu Indikator Kinerja Utama yang harus dicapai oleh seluruh unit kerja KKP. Tujuannya adalah mempermudah proses penciptaan, pengumpulan, penyimpanan dan berbagi tukar pengetahuan (knowledge sharing), menutup kesenjangan pengetahuan antara satu pegawai dengan pegawai lainnya serta meningkatkan kemampuan instansi dalam mengelola aset intelektual, pengetahuan dan pengalaman yang ada. Untuk itu, sebagai bentuk upaya pencapaian target IKU tersebut, KKP menggunakan aplikasi Bitrix24 sebagai sistem manajemen pengetahuan terstandar yang dimanfaatkan oleh seluruh satuan kerja termasuk LRSDKP.

Ruang lingkup manajemen pengetahuan di tahun 2022 diterjemahkan sebagai tingkat penerapan MP di LRSDKP, dihitung dari 3 variabel, yaitu: (i) Sharing dokumen, (bobot 20%) meliputi Renstra 2020-2024, Perjanjian Kinerja 2022, Manual IKU 2022, Rencana Kerja Tahunan 2022, Renaksi Kinerja atas PK Tahunan 2022 dan Laporan Kinerja tahun 2021. (ii) Keikutsertaan Pejabat administratif sampai dengan staf unit kerja (bobot 10%), Pimpinan Unit Eselon I–II, JFT (yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator), Staf Pelaksana (minimal 2 orang), Keaktifan Pejabat administratif unit kerja 3 kali dalam 1 triwulan upload berita (bobot 70%), **Pimpinan Unit Eselon II dan JFT yang diberikan tugas tambahan sebagai Koordinator dan Sub Koordinator**

Capaian IKU Persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem Manajemen Pengetahuan yang terstandar pada Triwulan II sebagai berikut:

Tabel 9. Capaian IKU 6 LRSDKP triwulan III tahun 2022

IKU	TARGET 2022	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%
Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker	86	86	100	116,28	86	100	116,28	86	100	116,28

Capaian indikator kinerja persentase unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada triwulan III Tahun 2022 tercapai sebesar 100% dari target sebesar 86% atau 116% lebih tinggi dari target yang ditetapkan. Komponen penilaian sebagai berikut:

1. Nilai Komponen Dokumen **100%**

DOKUMEN			
Dokumen	Target	Capaian	%
Renstra 2020 – 2024	1	1	100,00
Perjanjian Kinerja (UPT)	1	1	100,00
Manual IKU (UPT)	1	1	100,00
Rencana Kerja Tahunan	1	1	100,00
Rencana Aksi	1	1	100,00
Laporan Kinerja	3	3	100,00
			100,00

2. Nilai Komponen Keikutsertaan **100%**

KEIKUTSERTAAN			
LEVEL	Capaia (orang)	Target (orang)	%
Level 3	1	1	100,00
Sub koordinator	3	3	100,00
Pelaksana*	3	3	100,00
			100,00

3. Nilai Komponen Keaktifan **100%**.

KEAKTIFAN			
LEVEL	Capaia (Aktif)	Target (Aktif)	%
Level 3	6	6	100,00
Sub koordinator	18	18	100,00
			100,00

Capaian triwulan III merupakan rata-rata capaian pada triwulan I, triwulan II dan triwulan III, Dengan skor triwulan I sebesar 100%, triwulan II sebesar 100% dan triwulan III sebesar 100%, maka capaian pada triwulan III sebesar 100%. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar LRSDKP mencapai target yang telah ditetapkan. Capaian unit kerja LRSDKP yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar pada tahun 2022 mencapai nilai 100% dari target sebesar 86%.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian IKU 6 pada triwulan III ini secara umum adalah:

- 1) Persentase nilai komponen dokumen 20,00% karena dokumen yang ditargetkan sudah diunggah pada sharing dokumen pada aplikasi bitrix24.
- 2) Persentase nilai keikutsertaan sebesar 10,00% karena Pimpinan dan Staff LRSDKP sudah berkontribusi dalam keikutsertaan dari tahun sebelumnya.
- 3) Persentase nilai keaktifan sebesar 70% karena Pimpinan LRSDKP dan 3 koordinator sudah berkontribusi aktif dari tahun sebelumnya dengan upload berita yang mengandung 5W + 1H dalam aplikasi Bitrix24.

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian IKU seperti kegiatan sosialisasi metode penilaian baru manajemen pengetahuan dan komitmen pimpinan dalam mendukung pencapaian IKU ini yang secara berkala mengingatkan jajarannya untuk aktif dalam manajemen pengetahuan di KKP serta Komunikasi yang rutin dan kontinyu dengan pengelola bitrix dan juga bagian datin pusriskel.

Capaian ini sudah maksimal 100% tetapi harus terus dipertahankan untuk triwulan selanjutnya dengan cara lebih aktif lagi dalam membangun komunikasi dan juga lebih aktif lagi dalam mengupload berita di media bitrix ini. penyampaian informasi yang rutin dan berkelanjutan melalui media online, website dan persuratan, secara langsung atau tidak langsung dan secara tegas memberikan pembinaan dan informasi agar manajemen pengetahuan ini terbiasa digunakan dalam keseharian.

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 7

Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)

IKU ini didefinisikan sebagai Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal kepada LRSDKP berdasarkan LHP yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh LRSDKP yang menjadi objek pengawasan.

Capaian IKU Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen) sebagai berikut:

Tabel 10. Capaian IKU 7 LRSDKP triwulan III tahun 2022

IKU	TARGET 2022	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%
Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	70	70	100	142,8	70	100	142,8	70	100	142,8

Indikator Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja LRSDKP (%) telah mencapai target yaitu 100% dari target 70%, karena tahun 2021 kemarin dan juga Sampai dengan tahun 2022 Triwulan III ini LRSDKP tidak ada kunjungan dari itjen sehingga tidak ada temuan yang harus ditindaklanjuti dan atas anjuran dari sekretariat BRSDM maka realisasi satker yang tidak ada kunjungan dan tidak ada temuan itjen maka nilai realisasinya adalah 100%.

Tercapaiannya IKU ini (tidak ada pengawasan dari itjen) merupakan keberhasilan dari pengendalian intern terhadap faktor-faktor yang menjadi titik kritis dari kegiatan yang ada di LRSDKP. sering adanya komunikasi tentang realisasi anggaran antara kepala UPT dengan Pusat riset kelautan juga merupakan langkan untuk menghindari adanya pengawasan ITJEN

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 8

Nilai IKPA Satker LRSDKP

Untuk Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya diukur pada triwulan II dan Triwulan IV. Hasil dari pengukuran pada Triwulan II adalah sebesar 89,98 atau 101% dari target triwulan II sebesar 70.

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 9

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP

Untuk Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya baru akan diukur pada triwulan IV.

INDIKATOR SASARAN KEGIATAN 10

Unit Kerja lingkup Pusat Riset Kelautan yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit Kerja)

Untuk Indikator Kinerja ini capaian kinerjanya baru akan diukur pada triwulan IV

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TRIWULAN III TAHUN 2022

Realisasi anggaran LRSDKP sampai dengan triwulan III tahun 2022, Berdasarkan rekapitulasi data OM SPAN sampai dengan tanggal 30 September 2022, adalah sebesar Rp3,427,031,671 (49,58%) yang terinci atas Belanja Pegawai sebesar Rp1.521.903.948,- (66,18%), Belanja Barang sebesar Rp 1.905.127.723 (41,30%). Rincian realisasi anggaran LRSDKP terdapat pada Tabel berikut:

Tabel 11. Realisasi anggaran LRSDKP Triwulan III tahun 2022

Nama Satker	Ket	Jenis Belanja			Total
		Pegawai	Barang	Modal	
LRSDKP	Pagu	2,299,616,000	4,612,531,000	0	6,912,147,000
	Realisasi	1,521,903,948	1,905,127,723	-	3,427,031,671
	%	66,18	41,30	-	49,58

Sumber: OMSPAN Kemenkeu, 30 September 2022

Realisasi anggaran per IKU sampai dengan Triwulan III tahun 2022 ini adalah sebagai berikut :

Tabel 12. Realisasi anggaran Per Sasaran Strategis Triwulan III Tahun 2022

Indikator Kegiatan		Kegiatan Pendukung	Anggaran/ Pagu (Rp)	Realisasi Rp	%
1	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket)	1). Kajian Terintegrasi Dinamika dan Mitigasi Kerentanan Pesisir di Kawasan Perikanan Budidaya Kab. Pematang dan Kep.Meranti	401.812.000	Diblokir	
		2). Kajian Indeks Kesehatan Laut di Kab. Padang Pariaman dan Kota Pariaman	208.188.000	Diblokir	
		3). Penilaian Situs Kapal Tenggelam (Japanese Cargo Shipwreck) di Desa Wairterang, sebagai Potensi Wisata Bahari Kab. Sikka, NTT	350.000.000	Diblokir	
		4). Identifikasi Sampah Laut dan Pesisir Pulau Sumatera (Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung)	300.000.000	Diblokir	
		5) Aplikasi Teknologi Membran untuk Peningkatan Kualitas Produk Kelautan dan Perikanan	240.000.000	Diblokir	
2	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (persen)	Pelayanan Kehumasan Riset Kelautan	8.010.000	6.771.023	84,53
		Pelayanan Kerjasama Riset Kelautan	16.990.000	6.114.244	35,98
		Pelayanan Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Riset Kelautan	13.200.000	0	0
		Pelayanan Tata Usaha dan Kerumahtanggaan Riset Kelautan	75.000.000	42.088.491	56,11
		Pelayanan Teknis dan Jasa Riset Kelautan	75.000.000	21.876.173	29,16
		Gaji dan Tunjangan	2.144.635.000	1.522.464.023	70,98
		Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.878.512.000	1.736.280.043	60,31
		Layanan Perencanaan dan Penganggaran	25.000.000	7.785.050	31,14
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	9.424.000	760.000	0,06
3	Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker	Pelayanan Keuangan Riset Kelautan (pelaporan Keuangan)	17.500.000	10.227.295	58,44

	LRSDKP (Persen)				
4	Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)	perencanaan dan pengembangan SDM LRSDKP	24.000.000	10.000.000	41,66
5	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	Pelayanan Monitoring dan Evaluasi (LRSDKP)	25.000.000	10.462.033	41,84
6	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	Pelayanan Sistem Informasi Riset Kelautan	5.288.000	3.920.305	74,13
7	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	Pelayanan Organisasi Riset Kelautan	46.800.000	26.910.416	57,50
8	Nilai IKPA Satker LRSDKP	Pelayanan Keuangan Riset Kelautan (pelaporan Keuangan)	17.500.000	10.227.295	58,44
9	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	25.000.000	7.785.050	31,14
10	unit kerja lingkup Pusat Riset Kelautan yang menerapkan inovasi pelayanan publik (unit Kerja)	Pelayanan Sistem Informasi Riset Kelautan	5.288.000	3.920.305	74,13
			6.912.647.000	3.427.591.746	49,58

Dalam pelaksanaan anggaran, sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang mempengaruhi penyerapan anggaran antara lain:

1. Adanya Perubahan Tusi organisasi dan anggaran Riset yang masih berada pada dipa LRSDKP mengalami pemblokiran sehingga mempengaruhi realisasi.
2. Adanya AA pada belanja 51 dan juga 53 mempengaruhi kinerja dan juga realisasi anggaran LRSDKP serta minusnya anggran 51 pada akun tunjangan kinerja.

Secara umum kinerja LRSDKP sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan tercapai secara optimal. Namun demikian, beberapa rekomendasi demi meningkatkan kinerja dan anggaran antara lain:

1. Melakukan koordinasi dan juga konsultasi dengan pusat dan sekertariat terkait dengan anggaran riset yang diblokir mau dikemamakan karena saat ini posisinya juga sudah akhir tahun.
2. Melakukan optimalisasi anggaran dengan cara pergeseran anggaran dari 002 ke akun 51 untuk menanggulangi kekurangan pembayaran tunjangan kinerja pegawai.
3. Melaksanakan seluruh kegiatan sesuai ROK yang telah ditetapkan.

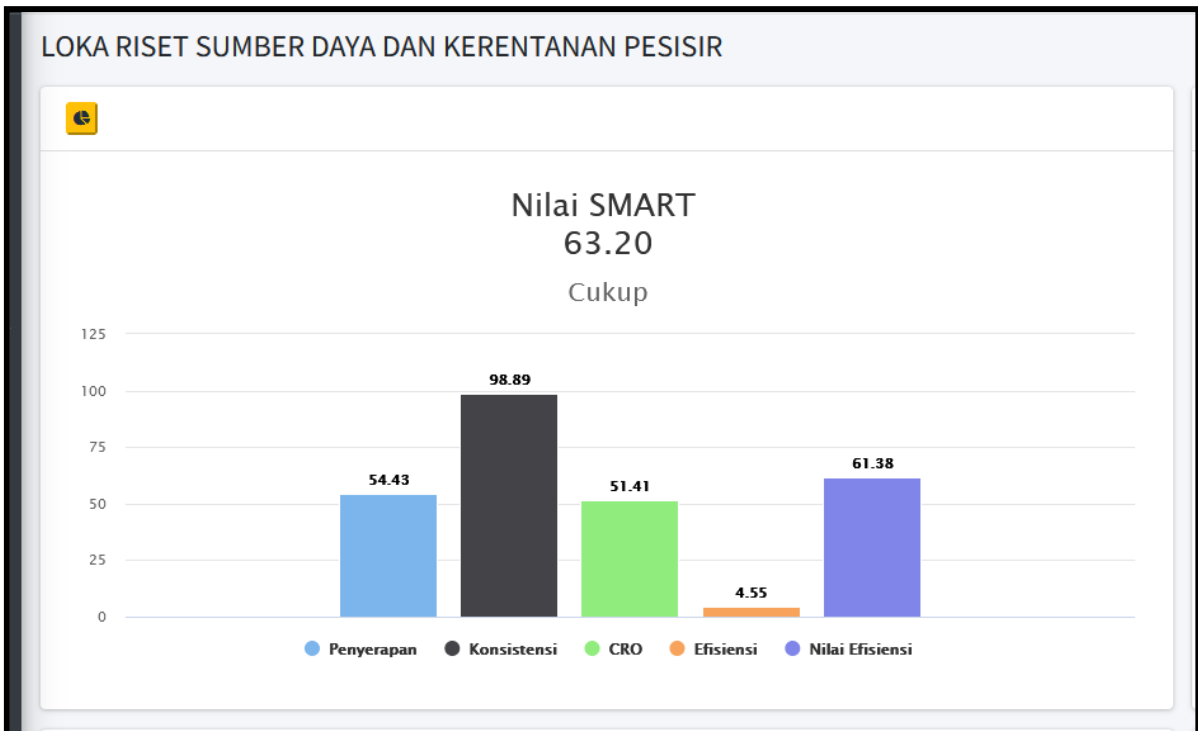
D. EFISIENSI ANGGARAN DAN ALOKASI SUMBER DAYA

Sebagai organisasi sektor publik LRSDKP dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Sumber daya ekonomi tidak hanya berupa sumber daya alam, tetapi juga sumber daya manusia, modal, serta wirausaha (entrepreneur). Alokasi sumber daya ekonomi berarti penentuan banyaknya jumlah sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan wirausaha yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang dan jasa. Manfaat mengetahui alokasi sumber daya ekonomi adalah menjadi bahan pertimbangan manusia dalam melakukan perencanaan kebijakan ekonomi terutama terkait penggunaan sumber daya alam. Modal berupa anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan untuk mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, disamping itu anggaran dipergunakan juga sebagai alat pengendalian untuk

mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan.

Penghitungan nilai efisiensi ini telah tersedia berbasis sistem dan dikembangkan oleh Kementerian Keuangan RI melalui aplikasi Smart DJA, dengan hasil sebagai berikut:



Gambar 5. Nilai Smart LRSDKP Triwulan III Tahun 2022

Nilai efisiensi anggaran LRSDKP pada Triwulan III adalah sebesar 61,38. Nilai efisiensi didapatkan dari efisiensi yang memiliki rentang nilai dari +20 sampai -20, Efisiensi yang mencapai skor 4,55 menyebabkan perolehan nilai efisiensi sebesar 61,38. Keberhasilan perolehan nilai efisiensi sebesar 61,38 dan capaian nilai Smart 63,20 dipengaruhi oleh beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Realisasi anggaran pada posisi 54,43% dengan tingkat output kegiatan mencapai 100% dan bahkan melampaui.
- 2) Terdapat beberapa output dengan pencapaian di atas 100%, seperti:
 - a) Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) , target 100%, realisasi 100%;

- b) Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen) 86%, realisasi 100% (116,28%);
- c) Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen) dengan target 70%, realisasi 100% (142,8%)

Pencapaian nilai efisiensi sebesar 61,38 menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran Triwulan III tahun 2022, terdapat efisiensi baik efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan telah berjalan dengan baik. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya.



BAB IV

PENUTUP

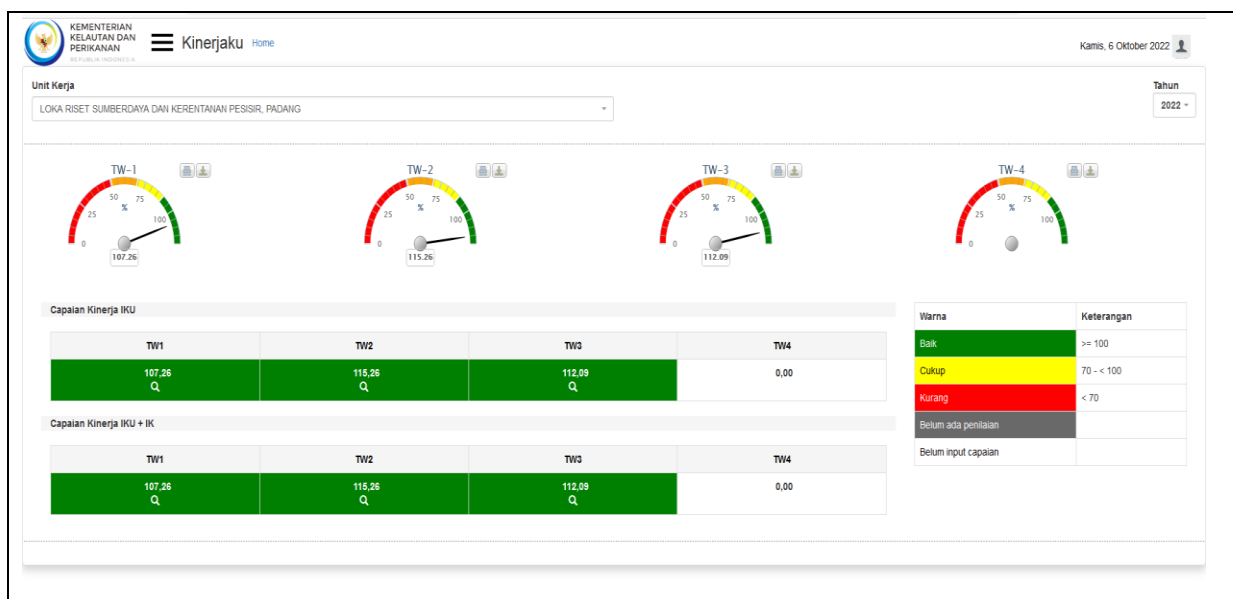
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada tahun 2022, LRSDKP memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 2 Sasaran Strategis dan 10 Indikator Kinerja Utama. Sampai dengan triwulan III tahun 2022, dari 10 IKU LRSDKP, terdapat 3 IKU berstatus hijau dan untuk indikator lain akan diukur pada triwulan berikutnya.

Pengukuran capaian kinerja LRSDKP triwulan III tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indicator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja LRSDKP di tingkat korporat triwulan III tahun 2022 sebesar 112,09%, sebagaimana *dashboard* kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 6. Dashboard Kinerjaku LRSDKP

Rincian Target dan Realisasi dari 3 IKU tersebut adalah :

1. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen), Target Triwulan III sebesar 100 dengan capaian 100 atau (100%).
2. Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen), Target Triwulan III sebesar 86 dengan capaian 100 atau 116,27%.
3. Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindaklanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen), Target Triwulan II sebesar 70 dengan capaian 100 atau 142,8%.

B. REKOMENDASI

Secara umum kinerja LRSDKP cukup baik, namun demikian dalam rangka peningkatan kinerja perlu dilakukan perhatian terhadap hal-hal sebagai berikut:

IKU dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh stakeholders LRSDKP.

LAMPIRAN

PK LRSDKP 2022 AWAL



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711585
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 **LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR** **PUSAT RISET KELAUTAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nia Naelul Hasanah Ridwan
Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Nyoman Radiarta
Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan


I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber
Daya dan Kerentanan Pesisir


Nia Naelul Hasanah Ridwan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TARGET
KEGIATAN 1. Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ^{a,b}				
SK.1.1	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	ISK.1.1.1	Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada satker LRSDKP (Unit) ^{a,b}	1
KEGIATAN 2. Riset Kelautan ^c				
SK.2.1	Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Kelautan	ISK.2.1.1	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) ^c	5
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP ^b				
SK.3.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	ISK.3.1.1	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) ^b	100
		ISK.3.1.2	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Satker LRSDKP (Persen)	≤1
		ISK.3.1.3	Indeks Profesionalitas ASN Satker LRSDKP (Indeks)	76
		ISK.3.1.4	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92
		ISK.3.1.5	Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LRSDKP (Persen)	86
		ISK.3.1.6	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LRSDKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (Persen)	70
		ISK.3.1.7	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89
		ISK.3.1.8	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ^{a, b}	1.500.000.000
2	Riset Kelautan ^c	1.500.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP ^b	5.412.147.000
TOTAL ANGGARAN		8.412.147.000

^a Output Cadangan

^b Automatic Adjustment

^c Blokir

Jakarta, Januari 2022

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan

I Nyoman Radjarta



Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber
Daya dan Kerentanan Pesisir

Nia Naelul Hasanah Ridwan



PK LRSDKP 2022 REVISI



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 3 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711583
LAMAR www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Nia Naelul Hasanah Ridwan**
Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya Dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **I Nyoman Radiarta**
Jabatan : Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan Pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2022

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan



I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber
Daya Dan Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN		TARGET
KEGIATAN 1. Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ^{a,b}				
SK.01	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kebijakan Pengelolaan Kelautan dan Perikanan	IKSK.01.01	Sarana Pengelolaan Kebijakan Kelautan dan Perikanan pada satker LRSDKP (unit)	1
KEGIATAN 2. Riset Kelautan ^c				
SK.02.	Tersedianya Data, Informasi dan rekomendasi Kebijakan hasil Riset Kelautan	IKSK.02.01	Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) (Paket)	5
KEGIATAN 3. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP ^b				
SK.03	Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir	IKSK.03.01	Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen)	100
		IKSK.03.02	Unit Kerja LRSDKP yang menerapkan Inovasi Pelayanan publik (unit Kerja)	1
		IKSK.03.03	Batas Tertinggi Nilai temuan LHP BPK atas LK satker LRSDKP (Persen)	≤ 1
		IKSK.03.04	Indeks Profesionalitas ASN satker LRSDKP (Indeks)	76
		IKSK.03.05	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92
		IKSK.03.06	Presentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar satker LRSDKP (Persen)	86
		IKSK.03.07	Persentase Rekomendasi hasil pengawasan satker LRSDKP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (Persen)	70
		IKSK.03.08	Nilai IKPA Satker LRSDKP	89
		IKSK.03.09	Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Perumusan Kebijakan Kelautan dan Perikanan ^{a,b}	1.500.000.000
2	Riset Kelautan ^c	1.500.000.000
3	Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM KP ^b	5.412.147.000
TOTAL ANGGARAN		8.412.147.000

^a Output Cadangan

^b Automatic Adjustment

^c Blokir

Jakarta, Februari 2022

Pihak Kedua
Kepala Pusat Riset Kelautan



I Nyoman Radiarta

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber
Daya Dan Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan

PK LRSDKP 2022 REVISI 2



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN PASIR PUTIH II ANCOL TIMUR JAKARTA 14430
TELEPON (021) 64711583 (LACAK), FAKSIMILE (021) 64711685
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR PUSAT RISET KELAUTAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nia Naelul Hasanah Ridwan**
Jabatan : Kepala Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rudi Alek Wahyudin**
Jabatan : Plt.Kepala Pusat Riset Kelautan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Mei 2022

Pihak Kedua
Plt.Kepala Pusat Riset Kelautan



Rudi Alek Wahyudin

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber
Daya dan Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
LOKA RISET SUMBER DAYA DAN KERENTANAN PESISIR
PUSAT RISET KELAUTAN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	TARGET
1	Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Kelautan	1 Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya dan Kerentanan Pesisir (Rekomendasi Teknis) ^a	5
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	2 Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Satker LRSDKP (Persen) ^b	100
		3 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Satker LRSDKP (Persen)	≤1
		4 Indeks Profesionalitas ASN Satker LRSDKP (Indeks)	76
		5 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Satker LRSDKP (Nilai)	92
		6 Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar Satker LRSDKP (Persen)	86
		7 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Satker LRSDKP yang Dokumen Tindak Lanjutnya Telah Dilengkapi dan Disampaikan (Persen)	70
		8 Nilai IKPA Satker LRSDKP	89
		9 Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Satker LRSDKP	81
		10 Unit kerja Lingkup Pusat Riset Kelautan yang menerapkan inovasi pelayanan publik (Unit Kerja)	1

Data Anggaran

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
Riset Kelautan ^a		
1	Tersedianya Data, Informasi dan Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Kelautan	1.500.000.000
Dukungan Manajemen ^b		
2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Loka Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir	5.412.147.000
TOTAL ANGGARAN		6.912.147.000

Catatan:

^a Blokir

^b Automatic Adjustment

Jakarta, 12 Mei 2022

Pihak Kedua
Plt.Kepala Pusat Riset Kelautan



Rudi Alek Wahyudin

Pihak Pertama
Kepala Loka Riset Sumber
Daya dan Kerentanan Pesisir



Nia Naelul Hasanah Ridwan